SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO 2022-2023

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh :
Audila Nurmauliza
E1112201036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO 2022-2023

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:

Audila Nurmauliza
NIM. E1112201036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO 2022-2023

Tanggung Jawab Yuridis pada:

AUDILA NURMAULIZA

NIM. E1112201036

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si

NIP. 198007302003122002

Tanggal 21-05-2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Azzomarayosra Wicaksono, S.IP, M.H.I

NIP. 19930219202311013

Tanggal : 22-05-2025

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI *HUMAN TRAFFICKING* DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT – MEKSIKO 2022-2023

Oleh:

Audila Nurmauliza

NIM. E1112201036

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada	
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 Juni 2025
Waktu	: 15.00 – 17.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang I

Tim Penguji

Dosen Pembimbing Utama

Ully Nuzulian, S.IP, M.Si
NIP. 198007302003122002

Dosen Pembimbing Pendamping

Azzomarayosra Wicaksono, S.IP, M.H.I
NIP. 199302192023111013

Dosen Penguji Utama

Dr. S. Y. Pudjianto, M. Si
NIP. 196011141987031003

Dosen Penguji Pendamping

Deni Darmawan, SE, M.Si
NIP. 197306092007011001

Disahkan Oleh :
Dekan Fisip Universitas Tanjungpura

Dr. Herlan, S.sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Human trafficking atau biasa juga disebut perdagangan manusia, adalah kejahatan global yang kompleks dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia serta isu kesehatan masyarakat. Fenomena ini mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh, yang mempengaruhi jutaan individu dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Perdagangan manusia ini terjadi di berbagai negara termasuk diperbatasan Amerika Serikat – Meksiko. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai tentang peran pemerintah Amerika Serikat dalam menanggapi dan mengatasi perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Amerika serikat – meksiko. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi literatur dan dokumentasi.

Kata Kunci : Perdagangan manusia, pemerintahan, Amerika Serikat, Meksiko, Perbatasan, dan kejahatan internasional.

ABSTRACT

Human trafficking is a form of modern-day slavery and constitutes a grave violation of human rights. Commonly referred to as a global crime, human trafficking is a complex transnational issue involving both human rights violations and public health concerns. This phenomenon includes sexual exploitation, forced labor, slavery, and organ trafficking, affecting millions of individuals across various social, cultural, and economic backgrounds. Human trafficking occurs in many parts of the world, including along the United States–Mexico border. This research aims to provide a comprehensive understanding of the role of the United States government in responding to and addressing human trafficking at the U.S.–Mexico border. The study employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques.

Keywords: Human trafficking, Government, United States, Mexico, Border, International Crime.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Amerika Serikat Dalam Mengatasi Human Trafficking di Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 2022 – 2023" Alasan dalam pemilihan judul ini dikarenakan Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan isu global yang masih menjadi masalah serius, khususnya di wilayah perbatasan seperti Amerika Serikat dan Meksiko Dengan memilih wilayah perbatasan Amerika-Meksiko, penelitian ini memiliki fokus geografis yang jelas dan konkret, sehingga memudahkan analisis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Pemerintah Amerika Serikat memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan imigrasi, keamanan perbatasan, serta hukum federal terkait human trafficking. Oleh karena itu, menganalisis peran pemerintah menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Amerika Serikat dalam menangani fenomena Human Trafficking di Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 2022 – 2023. Penelitian ini menggunakan teori peran dalam menganalisis peran pemerintah Amerika Serikat dalam menangani kasus Human Trafficking di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 2022 – 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan studi literatur dan dokumentasi yang peneliti lakukan melalui Teknik pengumpulan data dengan meninjau segala informasi berbentuk dokumen seperti buku, arsip,

gambar, video, laporan, keterangan serta artikel yang bisa mendukung penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pertama, peran pemerintah dilihat dari Aspek Pemimpin Regional dimana pemerintah melaksanakan perannya dengan melakukan tiga pilar utama, yakni pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Kedua, peran pemerintah dilihat dari Aspek pelindung regional dimana pemerintah melaksanakan perannya dengan menekankan pada pemberian perlindungan terhadap wilayah yang berdekatan salah satunya adalah bekerjasama dengan negara Meksiko. Ketiga, peran pemerintah dilihat dari Aspek developer dimana pemerintah melaksanakan perannya dengan menunjukkan tugas khusus atau kewajiban khusus suatu negara untuk membantu pembangunan negara berkembang jadi dalam peran tersebut peran pemerintah Amerika Serikat adalah dengan menyediakan visa khusus (T-Visa, U-Visa). T-Visa adalah visa nonimigran yang diberikan kepada korban perdagangan manusia dalam bentuk parah di Amerika Serikat sedangkan U-Visa adalah visa nonimigran Amerika Serikat yang disediakan untuk korban kejahatan tertentu yang bersedia membantu penegak hukum dalam penyelidikan atau penuntutan kejahatan tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi perdagangan manusia di perbatasan Amerika Serikat - Meksiko Meningkatkan Koordinasi Antarlembaga, Penambahan Sumber Daya, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Dukungan Berkelanjutan bagi Korban.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Audila Nurmauliza

Nomor Induk Mahasiswa : E1112201036

Program Studi / Angkatan : Ilmu Hubungan Internasional / 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dan di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 02 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Nurmauliza

NIM. E1112201036

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. "

"Winston Churchill"

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang banyak berkontribusi didalam hidup saya dalam proses penyelesaian skripsi saya :

1. Diri saya sendiri, Audila Nurmauliza Terima kasih kerjasamanya untuk terus semangat menjalani semua tahapan perkuliahan yang tidak mudah ini.
2. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu bapak Nurdin Kasim (Alm) dan Ibu Jamilah terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan baik moril dan materil, memanjatkan beribu doa, memberikan kasih sayang serta semangat yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
3. Kepada kakak dan abang saya Nurjamiyati, Ferry Nurachman, Devi Apriliasari, dan Tri Setyani terima kasih atas segala dukungan, motivasi, doa, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada saya dari awal masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
4. Dan teman-teman saya, Vivella, Diva, Lidia, Kanita, Nia, Valentira, dan Teman Smp saya Nisa, Imelda, Dinda, Nasya Aulia dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atau rahmat dan hidayah- Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : "Peran pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 2022 – 2023" ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis juga menyadari kekurangan dari penulisan skripsi ini , Karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini merupakan Langkah awal dari perjalanan Panjang Ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ully Nuzulian S.IP , M.Si selaku pembimbing utama , dan Azzomarayosa Wicaksono S.IP, M.H.I selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dalam membimbing selama proses penulisan skripsi ini.
3. Dr. S. Y. Pudjianto, M. Si selaku dosen penguji pertama dan Deni

Darmawan, SE, M. Si selaku dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Hairil Anwar, SE selaku dosen pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku ketua pengelola ppapk selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ayah (Alm) dan mama yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat terutama doa yang akhirnya bisa membawa saya untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).
7. Seluruh teman – teman FISIP untan Angkatan 2020 terutama Diva Aurelia, Rahmania, Lidia Anggraeni, Kanita Sabilla, Vivella, dan Valentira dan sahabat sekolah menegah pertama yaitu Uray Imelda, Nisa Febrian, Nasya Aulia, Dinda M, yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, nasihat, dukungan dan pertolongan yang telah diberikan mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT, penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pontianak, 02 Juni 2025

Audila Nurmauliza
NIM. E1112201036

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR ..... **i**
SAMPUL DALAM ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR BAGAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 13
1.3 Fokus Penelitian 14
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.6.1 Manfaat Teoritis 14
1.6.2 Manfaat Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1 Konsep Human Trafficking 16
2.2 Teori Peran 18
2.3 Alur Pikir Penelitian 29
2.4 Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN **31**

3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3.3.1 Lokasi Penelitian 32
3.3.2 Waktu Penelitian 34
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 34
3.4.1 Unit Analisis 35
3.4.2 Unit Eksplanasi 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 35
3.5.1 Studi literatur 35
3.5.2 Dokumentasi 36
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 36
3.6.1 Alat Dokumentasi 37
3.7 Analisis Data 37
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 37
3.7.2 Triangulasi Sumber 37
3.7.3 Triangulasi Teknik 38
3.7.4 Triangulasi Waktu 38
3.8 Teknik Analisa Data 39
3.8.1 Data Collection/Pengumpulan data 39
3.8.2 Data Reduction (Reduksi Data) 39
3.8.3 Data Display (Penyajian Data) 40
3.8.4 Conclusion Drawing/Verification 40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 42
4.1 Amerika Serikat 42
4.1.1 Gambar Bendera Negara Amerika Serikat 46
4.2 Demografi Penduduk Amerika Serikat 48
4.3 Meksiko 54
4.4 Demografi Penduduk Meksiko 58
4.4.1 Gambar Bendera Negara Meksiko 62
4.5 Perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko 63

4.5.1 Gambar Wilayah Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
5.1 Peran pemerintah Amerika serikat dalam mengatasi kasus Human Trafficking di Kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko Berdasarkan Aspek Pemimpin Regional. 68
5.2 Peran pemerintah Amerika serikat dalam mengatasi kasus Human Trafficking di Kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko Berdasarkan Aspek pelindung regional 70
5.3 Peran pemerintah Amerika serikat dalam mengatasi kasus Human Trafficking di Kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko Berdasarkan Aspek developer. 71
5.4 Dampak Krisis Global Memperburuk Kerentanan Terhadap Human Trafficking..... 72
BAB VI PENUTUP 75
6.1 Kesimpulan 75
6.2 Saran..... 79
6.3 Keterbatasan Penelitian 80
DAFTAR PUSTAKA 81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 85

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1. 1 Mexico to America : Number of Human Trafficking cases 2015- 2023 4
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Relevan 26
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 Rute dan jalur utama dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi di Meksiko 2
Gambar 4.1 Bendera Negara Amerika Serikat 46
Gambar 4.2 Bendera Negara Meksiko 62
Gambar 4.3 Wilayah Perbatasan Amerika Serikat – Meksiko 65

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

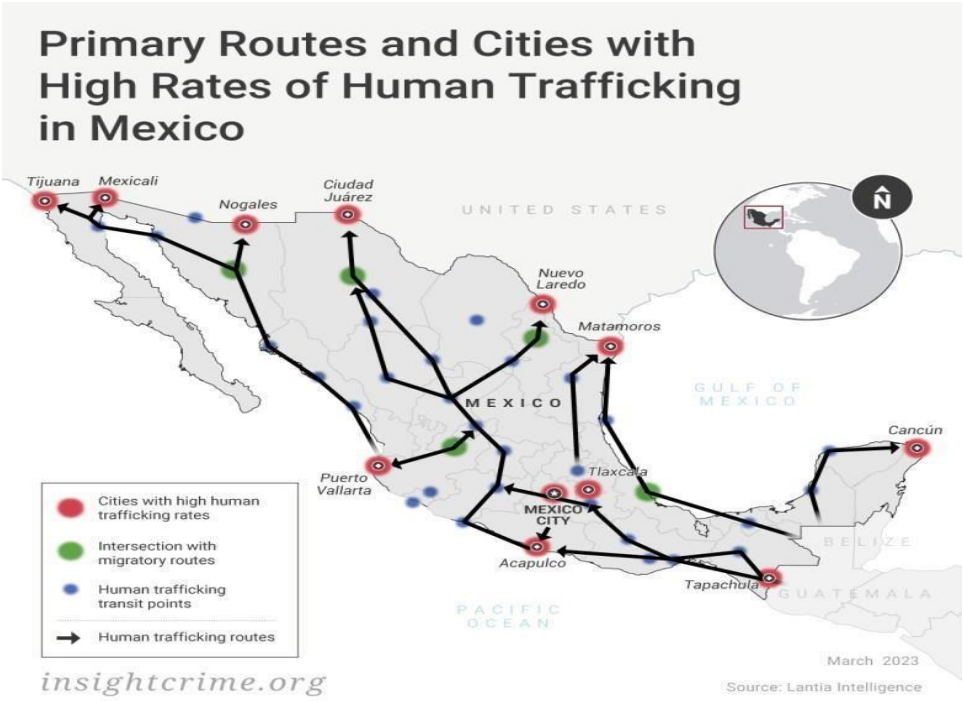
Human trafficking atau biasa dikenal dengan perdagangan manusia ialah salah satu kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi banyak negara di dunia, karena sangat melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat. Saat ini, perdagangan manusia telah meluas dalam segala macam cara, rupa dan bentuk seperti menjual organ manusia, pekerja seks komersial (prostitusi), kerja paksa serta eksploitasi anak dibawah umur.

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan ekonomi yang paling kompleks di dunia. Hal tersebut terjadi di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, tempat segelintir kelompok kejahatan terorganisir beroperasi dengan berbagai tingkat kekuatan dan kecanggihan serta terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal. Saat ini terdapat beberapa ratus kelompok kejahatan yang beroperasi di seluruh Meksiko.

Perdagangan manusia seringkali dianggap sebagai tindakan kriminal paling menguntungkan di dunia, dikarenakan potensi keuntungan yang signifikan menurut dari laporan yang dikutip dari Organisasi Buruh Internasional perdagangan manusia bisa menghasilkan hingga mencapai $ 150 miliar disetiap tahunnya. Perbatasan Amerika serikat - Meksiko merupakan salah satu wilayah di mana perdagangan manusia berkembang.

(Parker Asmann & Steve Dudley, 2023).

Di negara bagian barat baja California yaitu Tijuana – Mexicali pemeran utama dalam perdagangan manusia merupakan mucikari lokal dan klan keluarga. Taktik yang biasa digunakan untuk memancing korban adalah iklan pekerjaan palsu dan janji palsu persahabatan. Beberapa ahli memperkirakan ada sekitar ratusan sel perdagangan antara orang yang terlibat dalam eksploitasi perdagangan manusia. Korban mereka seringkali migran yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan.



Gambar 1.1 Rute dan jalur utama dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi di Meksiko

Sumber : *insight crime*

Temuan ini didasarkan pada penelitian desktop dan lapangan dari *insight crime* selama dua tahun di negara bagian Baja California, Chihuahua, Sonora, dan Tamaulipas, Meksiko.

Kebanyakan peneliti setuju bahwa faktor sosial yang mendorong seseorang untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (prostitusi) adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan sangat berkaitan atau berhubungan dengan minimnya kesempatan kerja, kondisi kuangan keluarga yang kurang/minim dan juga rendahnya tingkat pendidikan. Anak-anak yang berada di kondisi keluarga miskin seringkali menjadi target dari mucikari untuk direkrut menjadi pekerja seks komersial, baik secara langsung maupun melalui tipu daya dan bujuk rayu. Dalam situasi seperti ini, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi korban eksploitasi akibat ketidakberdayaan ekonomi keluarga. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak membuat mereka tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga menjadikan prostitusi sebagai salah satu jalan pintas untuk bertahan hidup (Yirdam R, 2017).

Human trafficking merupakan salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih pemerintah Amerika Serikat, dimana setiap tahunnya negara ini menjadi tujuan utama para pelaku *human trafficking* yang berasal dari banyak negara berkembang seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin untuk memperdagangkan korbannya. Selain itu, banyak juga imigran ilegal yang masuk ke negara Amerika Serikat dengan bantuan "coyotes" atau *immigrant smugglers* yang kemudian menjerumuskan mereka kedalam perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Tabel 1. 1 Mexico to America : Number of Human Trafficking cases 2015- 2023

Tahun	Jumlah Kasus Per- tahun
2015	1.195
2016	743
2017	537
2018	560
2019	538
2020	551
2021	621
2022	802
2023	729

Sumber : Statista Research Department, 5 Juli 2024

Menurut data di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 kasus *Human Trafficking* ini sempat memuncak dan menurun pada tahun 2023. Pemerintah Amerika Serikat meningkatkan upaya perlindungan secara keseluruhan, perdagangan manusia di Amerika Serikat terus mencerminkan warisan hidup dari rasisme. Pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk meminimalisir permintaan tindakan seks komersial, termasuk dengan mengadili individu atas perdagangan seks yang melibatkan anak-anak.

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (*U.S Department of Homeland Security*) melakukan operasi yang menargetkan *platform online* yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengganggu dan membongkar operasi mereka serta untuk mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan manusia. Pemerintah tidak meningkatkan

kemampuannya untuk mencegah perdagangan manusia melalui program visa berbasis ketenaga kerjaan dan visa non-imigran lainnya atau meminta pertanggungjawaban pemberi kerja, kontraktor buruh tani, dan agen mereka, termasuk perekrut tenaga kerja, atas praktik-praktik yang diketahui mengarah pada perdagangan manusia.

Pemerintah Meksiko tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, tetapi melaksanakan upaya yang signifikan guna mencapainya. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan yang memperlihatkan bahwasanya terjadi peningkatan upaya pemerintah dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah tidak meningkatkan upayanya untuk menyaring indikator-indikator perdagangan manusia di kalangan kelompok rentan dan merujuk calon korban ke penyedia layanan, praktik perekrutan yang curang terus meluas, namun pemerintah tidak mengambil langkah untuk memintah pertanggungjawaban perekrut atau agen tenaga kerja (*U.S Department of State, 2022*).

Aspek kemiskinan, ketidakmampuan, pengangguran serta ketidakberdayaan menjadi sebuah permasalahan yang membuat banyak orang memilih terjerumus kedalam perdagangan manusia dengan mengabaikan nilai dan prinsip dari HAM, dimana setiap manusia berhak untuk tidak didiskriminasi, tidak disiksa, dan berhak menentukan nasib untuk dirinya sendiri tanpa adanya paksaan

Kejahatan perdagangan manusia terjadi di seluruh Meksiko dan dapat melampaui perbatasan, tetapi sejumlah negara bagian di sepanjang perbatasan

AS-Meksiko telah lama menjadi hotspot perdagangan manusia. Selama enam bulan pertama tahun 2022, Jumlah korban perdagangan manusia yang dilaporkan meningkat berasal dari Meksiko, ketika pejabat pemerintah berjuang untuk merancang strategi baru untuk meningkatkan identifikasi korban dan mencegah peningkatan eksploitasi yang diperburuk oleh pandemi virus corona.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, Meksiko memainkan peran signifikan dalam dinamika perdagangan manusia. Negara ini tidak hanya menjadi salah satu sumber utama, tetapi juga berfungsi sebagai jalur transit serta tujuan akhir bagi korban eksploitasi seksual dan kerja paksa. Di antara kelompok yang paling rentan terhadap praktik ini adalah perempuan, anak-anak, komunitas penduduk asli, serta para migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

Mereka yang memiliki risiko tertinggi untuk diperdagangkan dari Meksiko, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk anak-anak tanpa pendamping, penduduk asli, pencari suaka dan migran, dan pekerja sektor informal, di antara populasi rentan lainnya.

Bentuk eksploitasi yang paling banyak dilaporkan adalah eksploitasi, tetapi pakar perdagangan manusia mengatakan kepada *InSight Crime* bahwa itu tidak menjadikannya jenis perdagangan yang paling umum. Eksploitasi tenaga kerja di industri pertanian, konstruksi, dan manufaktur yang berasal dari Meksiko juga tersebar luas, tetapi jauh lebih sedikit yang dilaporkan. Dengan semakin banyaknya orang yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi genting

lainnya, ada banyak pekerja putus asa yang rentan terhadap eksploitasi (*Insight Crime*).

Pihak berwenang tidak secara konsisten menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dan layanan keseluruhan untuk korban tidak memadai. Praktik perekrutan yang curang terus meluas, tetapi pemerintah tidak mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban perekrut atau agen tenaga kerja.

Pemerintah tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum untuk pemberantasan perdagangan manusia namun, mereka melakukan berbagai upaya signifikan untuk melakukannya. Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaan untuk undang-undang anti perdagangan manusia tahun 2012 dan terus mengoperasikan tempat penampungan dengan keamanan tinggi di ibu kota untuk para korban perdagangan seks yang berpartisipasi dalam proses hukum terhadap para pedagang mereka. Pemerintah federal dan negara bagian terlibat dalam berbagai kegiatan pencegahan. Keterlibatan resmi terus menjadi masalah serius. Pendanaan pemerintah untuk layanan korban dan tempat penampungan khusus tetap tidak memadai dan layanan ini hampir tidak ada di sebagian besar negara. Identifikasi korban dan koordinasi antar lembaga tetap lemah di banyak bagian negara.

Sebagai bagian dari program Demokrasi, Korupsi, dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dalam program Perempuan dan Kebijakan Luar Negeri, Melissa I.M. Torres diwawancarai mengenai pendekatan baru untuk menangani perdagangan manusia di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Melissa I.M Torres merupakan seorang sarjana afiliasi di pusat kebijakan keadilan institut perkotaan, dan juga peneliti kesehatan global, divisi kesehatan mental global (program anti perdagangan manusia dan klinik trauma internasional), Torres menekankan bahwa cakupan pemahaman tentang siapa yang rentan terhadap perdagangan manusia terlalu sempit. Perdagangan manusia di perbatasan Amerika Serikat - Meksiko merupakan masalah yang tidak terbatas pada migran dan kartel, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan. Bahkan, ia menyatakan bahwa mereka yang tinggal di sisi AS termasuk yang paling rentan terhadap perdagangan manusia. Pendukung terbesar kerentanan terhadap perdagangan manusia adalah kemiskinan. Torres menjelaskan bahwa perlu ada peningkatan fokus pada penyebab sistemik dan perlindungan terhadap perdagangan manusia seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan yang lebih baik, dan sistem perawatan kesehatan.

Masalah yang signifikan adalah kurangnya pemahaman tentang perdagangan manusia di antara para migran, masyarakat perbatasan, dan personel yang bekerja di daerah tersebut. Torres menyoroti perlunya mempertimbangkan konteks bahasa dan budaya. Lebih jauh, eksploitasi telah menjadi hal yang sangat normal di masyarakat migran sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan. Berasal dari situasi yang seringkali lebih buruk, banyak yang tidak melihat pilihan lain selain mengambil pekerjaan bergaji rendah, karena itu lebih baik daripada tidak punya pekerjaan.

Kita perlu melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam membangun kesadaran tentang kejahatan perdagangan manusia yang sebenarnya sehingga lebih banyak orang mengerti ketika hal itu terjadi.

Torres juga menyampaikan bahwa gagasan tentang imigran 'ilegal' membuat banyak korban percaya bahwa mereka tidak memiliki hak dan tidak mencari keadilan. Sebaliknya, mereka menerima eksploitasi, dan kasus mereka tidak diperhatikan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa banyak anak di bawah umur tanpa pendamping sering dikirim ke AS untuk bekerja dan mengembalikan uang kepada keluarga mereka. Setibanya di AS, banyak anak-anak ditempatkan dalam situasi di mana, selain bersekolah, mereka juga harus membayar kebutuhan pokok seperti makanan dan sewa. Harapan para migran anak ini sangat besar dan kompleks secara budaya. Alih-alih melarang anak-anak bekerja dan dengan demikian memaksa mereka mencari cara alternatif, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, perlu ada kesempatan kerja yang adil bagi mereka.

Terakhir, Torres mengkritik kurangnya mekanisme perlindungan dan layanan bagi korban eksploitasi tenaga kerja. Dengan demikian, sistem yang ada sering kali berfokus pada perdagangan seks, meskipun sebagian besar anak-anak yang teridentifikasi di wilayah tersebut diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja. Lebih jauh, dan terkait dengan hal ini, laki-laki sering kali tertinggal karena banyak tempat penampungan tidak menerima mereka.

Dalam memerangi perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat menggunakan paradigma “Three P’s” yaitu pencegahan (prevention), perlindungan (protection), dan penuntutan (prosecution) (U.S. Department of State, 2016). Trafficking Victims Protection Act (TVPA) dirancang untuk menangani perdagangan manusia melalui pendekatan kerja sama internasional. Salah satu strategi utamanya adalah melakukan evaluasi terhadap upaya negara-negara dalam menangani isu ini, serta mendorong perbaikan kebijakan melalui pemantauan yang berkelanjutan. TVPA juga berfokus pada peningkatan kesempatan ekonomi di negara-negara asal sebagai upaya pencegahan, serta menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Dalam implementasinya, TVPA menyediakan perlindungan bagi para korban yang bersedia bekerja sama dalam proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Selain itu, undang-undang ini memastikan bahwa para pelaku kejahatan perdagangan manusia dapat dikenai hukuman baik melalui jalur pidana maupun perdata (Ryf, 2002).

Sejak diberlakukannya *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat mulai secara sistematis mengumpulkan dan merilis data statistik terkait upaya penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Laporan tahunan yang dikenal sebagai *Trafficking in Persons Report* (TIP Report) pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan mencakup informasi mengenai proses hukum, termasuk penuntutan dan regulasi yang diberlakukan oleh negara-negara di tingkat

internasional. Sementara itu, edisi TIP Report tahun 2007 menyajikan rincian lebih mendalam mengenai tindakan hukum terhadap perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa (*labor trafficking*). TVPA sendiri merupakan peraturan domestik yang disahkan oleh Kongres AS sebagai respons terhadap berbagai bentuk perbudakan modern, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Undang-undang ini merupakan bagian dari paket legislatif yang dikenal sebagai *Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*. Proses legislasi TVPA berhasil memperoleh dukungan mayoritas dengan hasil pemungutan suara 371-1 di Dewan Perwakilan Rakyat dan 95-0 di Senat, sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden William J. Clinton pada 28 Oktober 2000 (U.S. Congress, 2000).

Melalui *Trafficking Victims Protection Act of 2000* (TVPA), pemerintah Amerika Serikat menetapkan empat kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam rangka memerangi perdagangan manusia. Kepatuhan negara-negara terhadap standar minimum ini akan diawasi secara berkala dan dievaluasi setiap tahun oleh pemerintah AS. Hasil dari proses pemantauan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan yang dikenal sebagai *Trafficking in Persons Report* (TIP Report), yang menjadi acuan utama dalam menilai komitmen dan efektivitas kebijakan anti-perdagangan manusia di tingkat global yaitu:

> *"(1) Pemerintah negara harus melarang bentuk-bentuk perdagangan orang yang parah dan menghukum tindakan-tindakan perdagangan tersebut; (2) Untuk melakukan tindakan perdagangan seks yang*

> *melibatkan kekerasan, penipuan, paksaan, atau di mana korban perdagangan seks adalah anak yang tidak mampu memberikan persetujuan yang berarti, atau perdagangan yang mencakup pemerkosaan atau penculikan atau yang menyebabkan kematian, pemerintah negara harus menetapkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan berat, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan; (3) Untuk melakukan tindakan perdagangan orang yang parah, pemerintah negara harus menetapkan hukuman yang cukup keras untuk mencegah dan yang mencerminkan sifat kejam dari pelanggaran tersebut; (4) Pemerintah negara harus melakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menghilangkan perdagangan orang yang parah." (Departemen Luar Negeri AS, §108 Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia dan Kekerasan Tahun 2000)*

Pelaksanaan TVPA dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen, seperti teknologi mutakhir, data statistik, dukungan keuangan, serta tenaga profesional di bidangnya. Informasi yang disampaikan melalui laporan tahunan *Trafficking in Persons* yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berfungsi sebagai sarana evaluatif terhadap komitmen negara-negara dalam menangani isu perdagangan manusia secara global. Arus globalisasi yang kian pesat telah mendorong kemunculan beragam inovasi di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi secara luas. Amerika Serikat, sebagai negara pelopor dalam pengembangan

teknologi di dunia Barat, memanfaatkan kemajuan ini untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, baik dalam negeri maupun internasional. Beberapa teknologi yang dimanfaatkan antara lain berasal dari *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), Spotlight, PhotoDNA, CyberTipline, *National Human Trafficking Resource Center* (NHTRC), serta layanan pesan teks Be Free (Sadwick, 2016). Tak hanya itu, kampanye digital melalui media seperti YouTube juga dimanfaatkan. Salah satunya melalui *Anti-Human Trafficking Public Service Announcement* (PSA) bertajuk "MTV Human Trafficking PSA", yang berisi video pendek edukatif mengenai realitas dan dampak dari kejahatan perdagangan manusia bagi para korbannya.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa poin masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu, merupakan :

1. Belum maksimalnya peran pemerintah Amerika Serikat dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia dalam program yang berbasis ketenagakerjaan
2. Perdagangan manusia dapat merusak keamanan nasional dan menjadi suatu permasalahan yang menjadi penyebab perdagangan manusia.

1.3 Fokus Penelitian

Dengan melihat identifikasi masalah, maka fokus dari penelitian ini adalah peran dari pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* di Kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko pada tahun 2022 – 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintahan Amerika Serikat dalam menangani kasus *Human trafficking* di Amerika Serikat – Meksiko pada tahun 2022 - 2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tulisan ini untuk mengetahui Peran pemerintah Amerika Serikat terhadap kasus *Human Trafficking* yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko pada Tahun 2022 - 2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang ‘berhubungan dengan kasus perdagangan manusia dan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi studi hubungan internasional, dan juga sebagai sumber atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi dan pihak yang ingin mempelajari tentang *human trafficking*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti , penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang peran pemerintah dalam menghadapi kasus human trafficking di perbatasan antara Amerika serikat dan Meksiko.
2. Bagi mahasiswa/mahasiswi , penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai peran pemerintah di perbatasan antara Amerika Serikat.
3. Bagi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak – pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan di Kawasan perbatasan Amerika Serikat – Meksiko sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih optimal.